

PROBANK

MEMBANGUN PERBANKAN PROFESIONAL

No. 134 | Tahun XXXV | Juli-September 2018



**Fransisca Nelwan Mok:
Selaras dengan
Risk Appetite dan
Expertise Bank**

**Tumbuh
Ditopang
Investasi
Infrastruktur**

Berharap Tuah LTV

**PENERBIT**

Perhimpunan Bank Nasional
(Perbanas)

PELINDUNG

Badan Pengurus Perbanas

PEMIMPIN REDAKSI

Danny Hartono,
Sekretaris Jenderal Perbanas

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Rita Mirasari,
Ketua Bidang Humas Perbanas

REDAKTUR PELAKSANA

Achmad Friscantono

SIRKULASI

Wara Sri Indriani
Adrian Burhan

KONSULTAN

Infobank Communication

Redaksi menerima tulisan dari pihak luar. Panjang tulisan 3.000–6.500 karakter.

TARIF IKLAN**Cover**

Depan dalam dan belakang dalam/luar berwarna

• 1 halaman: Rp5.000.000,00

Isi

• 1 halaman: Rp4.000.000,00

• ½ halaman: Rp2.000.000,00

Probank menerima pemasangan iklan dalam bentuk laporan keuangan, *display* produk, dan suplemen profil perusahaan.

ALAMAT REDAKSI/IKLAN

Griya Perbanas Lantai 1
Jalan Perbanas, Karet Kuningan
Setiabudi, Jakarta 12940
Telepon: (021) 5255731, 5223038
Faksimile: (021) 5223037, 5223339

website: www.perbanas.org
e-mail: sekretariat@perbanas.org

IZIN PENERBITAN KHUSUS
MENPEN No. 1882/SK/DITJEN PPG/
STT/1993,
2 September 1993
ISSN: 0854-4174

Memanfaatkan Momentum Relaksasi LTV

Berbagai langkah perbaikan ekonomi yang dilakukan pemerintah yang dibarengi dengan kebijakan makroprudensial dari Bank Indonesia (BI) dinilai sebagai hal yang tepat dalam merespons kondisi perekonomian saat ini, baik domestik maupun global. Salah satu langkah bank sentral yang dinilai tepat ialah relaksasi kebijakan *loan to value* (LTV) dan *financing to value* (FTV) yang berlaku pada Agustus 2018. Kebijakan ini merupakan bagian dari bauran kebijakan yang salah satu tujuannya ialah mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional.

Walaupun tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan tersebut tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Misalnya saja, hanya bank yang memiliki tingkat kredit bermasalah atau *non performing loan* (NPL) di bawah 5% yang dapat memanfaatkan kebijakan pelonggaran ini.

Dengan berbagai kajian dan mekanisme yang ketat, BI memproyeksikan pelonggaran LTV/FTV ini tak akan berdampak pada lonjakan kredit bermasalah perbankan nasional. Hal itu berkaca pada pengalaman dari kebijakan pelonggaran LTV sebelumnya.

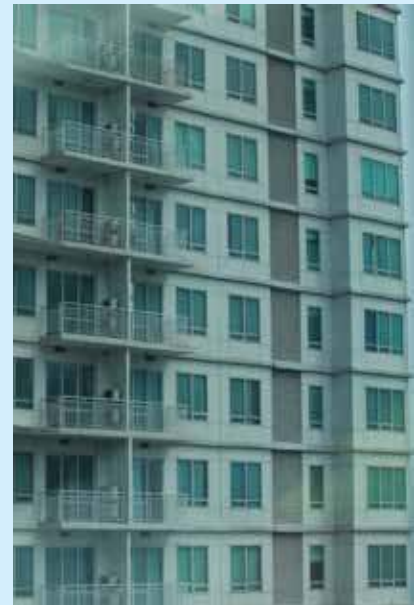
Kebijakan yang ditelurkan BI ini mendapatkan respons positif dari para pelaku industri, termasuk perbankan. Setidaknya ada ceruk pasar yang terakomodasi dari pelonggaran ini, yakni pangsa pasar atau konsumen yang memiliki kemampuan terbatas untuk membayar uang muka (*down payment/DP*), tetapi memiliki kemampuan yang baik untuk membayar cicilan.

Kendati demikian, ada bankir yang menyatakan kebijakan ini akan sulit untuk mendorong pertumbuhan kredit, terutama kredit pemilikan rumah (KPR), karena pelonggaran ini juga dibarengi dengan peningkatan suku bunga. Setidaknya kebijakan ini memiliki tujuan yang tepat, yakni mengakselerasi KPR, dan dinilai mampu menjaga KPR tidak turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dengan dirilisnya kebijakan ini, BI memproyeksikan KPR yang disalurkan perbankan di Tanah Air akan mengalami peningkatan. Diharapkan relaksasi LTV/FTV ini bisa mendorong pertumbuhan KPR hingga *double digit* pada tahun ini.

Kebijakan pemerintah maupun BI dalam rangka mengakselerasi sektor properti dinilai tepat dan harus diberikan dukungan. Pasalnya, sektor ini memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Indonesia, baik itu *output*, pendapatan, maupun penyerapan tenaga kerja.

Akan tetapi, kebijakan ini dinilai tidak akan berdampak signifikan jika tidak ditopang oleh kebijakan lainnya. Selain itu, harus ditopang dengan peningkatan daya beli masyarakat karena daya beli berkorelasi langsung dengan permintaan properti. ■



Dari Redaksi 1

Perbanas Utama

Berharap Tuah LTV 3

Berbagai langkah dan kebijakan diupayakan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan serta mengakselerasi perekonomian. Relaksasi LTV yang digelontorkan BI pada Agustus 2018 diharapkan bisa memacu kredit di sektor properti.



Langkah Tepat, tapi Ada Catatan 6

Relaksasi LTV Tetap Perhatikan Aspek Kehati-Hatian 7

Kebijakan relaksasi LTV yang dijalankan pada Agustus 2018 merupakan bauran kebijakan makroprudensial yang diusung BI. Prinsip kehati-hatian akan tetap menjadi aspek utama dalam penerapan relaksasi.

Tumbuh Kembang dan Tantangan KPR 8

Profil

Fransisca Nelwan Mok
Direktur ICBC Indonesia, Anggota Bidang Hubungan Masyarakat Perbanas, Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP)

Selaras dengan Risk Appetite dan Expertise Bank 9



Aktualita

Kesiapan Perbankan Nasional Menghadapi Disrupsi 12

Tumbuh Ditopang Investasi Infrastruktur 14

Faktor kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan Amerika Serikat serta ketegangan kawasan menciptakan risiko ketidakpastian global dan menimbulkan gejolak di banyak negara. Namun, di tengah tekanan perekonomian global tersebut, kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan pertengahan 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif.



Sekilas Berita

Uluran Industri Keuangan untuk Lombok 17

RUA Perbanas 2018 Sahkan Laporan Keuangan 2017 18

RUA Perbanas 2018 dan Bankers Discussion Forum 19

Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan 20

Program Desa Asuh Perbanas Jabar 21

Perbanas Sumut Tanam 2.000 Mangrove 22

Perbanas Sumut Peduli Lingkungan 23

Mortgage Forum Kerja Sama Perbanas dan Infobank 24

Suplemen

Piutang yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih

■ RALAT

Di Majalah Probank 133, edisi April-Juni 2018, halaman 18, terdapat kutipan komentar Parwati Surjaudaja mengenai pengangkatan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia. Komentar tersebut merupakan hasil riset wawancara atas berita yang dimuat di beberapa media online. Namun kami meminta maaf karena tidak menampilkan keseluruhan komentar sehingga dapat menimbulkan kesalahan dalam memperpersepsikan komentar tersebut. **Redaksi**



Berharap Tuah LTV

Berbagai langkah dan kebijakan diupayakan untuk mendorong penyaluran kredit perbankan serta mengakselerasi perekonomian. Relaksasi *LTV* yang digelontorkan BI pada Agustus 2018 diharapkan bisa memacu kredit di sektor properti.

Bank Indonesia (BI) resmi menetapkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif melalui relaksasi rasio *loan to value (LTV)* dan *financing to value (FTV)*. Kebijakan tersebut diterapkan pada sektor properti dan berlaku 1 Agustus 2018 melalui beberapa aspek.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menjelaskan, relaksasi kebijakan tersebut guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

“Elemen dalam kebijakan tersebut merupakan relaksasi yang dapat mendukung kinerja sektor properti yang saat ini masih memiliki potensi akselerasi dan dampak pengganda cukup besar terhadap perekonomian nasional,” jelas Perry. Perry menambahkan, beberapa aspek yang terkandung dalam kebijakan tersebut yaitu pelonggaran rasio *LTV* dan *FTV* untuk kredit atau pembiayaan properti, pelonggaran jumlah fasilitas kredit atau pembiayaan melalui mekanisme inden, serta penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan kredit atau pembiayaan.

Selain itu, nantinya kebijakan tersebut akan memperkuat kebijakan makroprudensial yang telah dirilis BI sebelumnya. Kebijakan yang dimaksud di antaranya terkait dengan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM), yang bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan dan memperkuat manajemen likuiditas perbankan.

Sebagai informasi tambahan, pada ketentuan *LTV/FTV* sebelumnya, pengaturan fasilitas kredit atau pembiayaan pertama untuk rumah tapak ≤ 70 m², rumah susun ≤ 21 m², dan rukan/ruko telah diserahkan kepada masing-masing bank. Pada kebijakan pelonggaran *LTV* 2018 ini, tipe rumah yang pengaturannya juga diserahkan kepada bank diperluas pada tipe rumah tapak dan rumah susun > 70 m² serta rumah susun tipe 22 m-70 m². Selain itu, untuk rasio *LTV* fasilitas kredit (FK) pertama tidak diatur lagi dan untuk fasilitas kredit kedua dan seterusnya *LTV* pada kisaran 80% sampai dengan 90%.

“Melalui kebijakan ini, BI akan memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur

Menkeu Dukung Kebijakan Relaksasi LTV

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku akan terus mendukung kebijakan BI mengenai relaksasi aturan rasio *LTV* dan *FTV* dalam kredit atau pembiayaan perumahan dan properti.

Dukungan tersebut disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat menggelar temu media mengenai pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di kantor Kemenkeu. Dirinya mengaku akan terus mendukung kebijakan tersebut guna terus menjaga stabilitas moneter. “Seperti disampaikan Pak Perry, BI di satu sisi akan jaga stabilitas melalui kebijakan moneter dan kami terus mendorong itu, salah satunya mengenai peningkatan pada sektor perumahan,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga akan terus melakukan bauran harmonisasi kebijakan guna mendukung stabilitasi tersebut, salah satunya dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga keuangan lainnya. “Kita membahas bagaimana pembauran kebijakan BI, Menkeu, LPS, dan OJK dapat dilakukan secara harmonis dan ini merupakan salah satu contoh untuk terus harmonisasi kebijakan. Dan, kami akan terus menjaga stabilitas dan keseimbangan antara volatilitas global dan di lain sisi kita coba menjaga momentum,” jelas Sri Mulyani.

sendiri jumlah *LTV/FTV* dari fasilitas kredit/pembiayaan pertama sesuai dengan analisis bank terhadap debiturnya dan kebijakan manajemen risiko masing-masing bank,” jelas Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Filianingsih Hendarta.

Langkah BI memberikan kelonggaran ketentuan *LTV/FTV* diyakini Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI), Soelaeman Soemawinata, akan menguntungkan pengembang properti. Paling tidak, dengan relaksasi tersebut, pengembang bisa lebih leluasa menyusun strategi pemasaran produk properti.

“Dengan adanya pelonggaran *LTV*, pengembang menjadi punya ruang untuk meramu strategi. Selama ini ‘*kan* pengembang memutar otak bagaimana menentukan besaran uang muka, skema pembayaran, dan strategi lain. Lewat relaksasi ini, kita bisa lebih leluasa menawarkan skema-skema yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan konsumen,” terang Soelaeman di acara Infobank Mortgage Forum yang bekerja sama dengan Perbanas, dengan tema “Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi *LTV*: Bagaimana Developer & Bank Mengambil Peluang”, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Menurut Soelaeman, kemampuan konsumen memang berbeda-beda. Ada calon konsumen yang punya kemampuan bayar cicilan per bulan, tapi tak punya cukup tabungan untuk melunasi besaran uang muka (*down payment/DP*). Dengan relaksasi *LTV* yang membebaskan besaran uang muka, konsumen seperti ini akan terbantu mendapatkan fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR).

“Misalnya saja, orang dengan penghasilan Rp8 juta sampai dengan Rp12 juta, tapi dengan gaya hidup anak zaman sekarang dia *enggak* bisa menabung *nih*. Tapi, dia mampu bayar cicilan. Bisa saja dia *me-reduce* biaya gaya hidupnya. Ambil contoh sisihkan Rp3,5 juta untuk bayar cicilan KPR. Tapi, dia belum punya uang muka, akhirnya dia bisa cicil,”

jelas Soelaeman.

Ke depan, pelonggaran *LTV* ini juga akan berdampak pada akselerasi program sejuta rumah, terutama di segmen KPR komersial. Karena masih ada gap, orang yang tadinya tidak punya uang muka, sekarang bisa ditarik ikut KPR.

Terkait dengan peningkatan penjualan properti atau perumahan, Soelaeman belum bisa memastikan relaksasi *LTV* akan berkontribusi berapa persen. Target optimistisnya setahun ke depan ada peningkatan penjualan sebesar 10%. “Kita optimistis tumbuh 10% dalam setahun setelah kebijakan ini berjalan. Tapi, ‘*kan* industri properti tidak mudah ditebak. Psikologis juga terpengaruh,” ungkap Soelaeman.

Pada intinya, ia menyebutkan, pelaku industri saat ini menyambut baik keputusan bank sentral tersebut. Kebijakan pelonggaran *LTV* akan menjadi nutrisi bagi industri properti yang tengah melesu.

Tak hanya itu, nantinya dengan memanfaatkan kebijakan relaksasi tersebut, pelaku industri properti dapat mulai merancang produknya agar diminati konsumen tanpa ada batas ruang KPR bagi rumah pertama. “Jadi, berharap ini adalah salah satu titik di mana properti bisa mulai pergerakannya positif. Itu kita sambut baik, tapi tentu hal lain kita juga butuhkan agar lebih baik,” tukas Soelaeman.

Respons positif pun datang dari pelaku usaha di sektor perbankan. BTN, misalnya, berencana akan menurunkan minimal pembayaran uang muka rumah nonsubsidi hingga di bawah 10%. Langkah tersebut dilakukan sehubungan dengan kebijakan relaksasi *LTV* yang dikeluarkan BI dan berlaku mulai Agustus 2018. Saat ini secara umum minimal pembayaran uang muka untuk rumah bersubsidi di BTN sekitar 10%.

“Nanti ‘*kan* ada relaksasi jadi kita bikin lebih ringan. Kalau BI ‘*kan* maksimal 0%. Tapi, ‘*kan* tidak harus 0% . Artinya, diserahkan kepada bank sesuai dengan mitigasi risikonya sendiri,” ungkap Budi Satria, Direktur Consumer Banking BTN.

DAMPAK PENGATURAN LTV (SETELAH RELAKSASI LTV 2018)



Pembelian rumah pertama dengan harga yang dapat dijangkau, akan naik.

Rumah komersial Rp200 juta-Rp500 juta memiliki kesempatan untuk tumbuh.



Ruang bagi para pengembang untuk membuat strategi marketing lebih luas dan bervariasi untuk menjangkau sasaran pasar.



KPR bisa berkompetisi dengan cicilan bertahap.



Industri properti dan industri ikutannya akan bergerak.

Sumber: Real Estate Indonesia

Kendati demikian, Budi tidak memberikan angka yang pasti, berapa persen uang muka KPR setelah relaksasi *LTV* ini. “Masih harus dibicarakan lagi BI aturannya seperti apa, yang jelas, uang mukanya untuk mendorong orang agar lebih mau mengambil KPR,” tutur Budi.

Ia juga mengatakan, selain menurunkan uang muka untuk rumah bersubsidi, BTN akan tetap fokus untuk menjaga tingkat kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)*.

“Jangan lupa dalam unsur *LTV* itu tidak hanya uang muka maksimal 0%, tapi juga ada ketentuan tingkat *NPL*. Kalau *NPL* di atas 5% ‘kan ketentuan tidak berlaku,” jelas Budi.

Kebijakan BI dalam merelaksasi *LTV/FTV* ini juga diyakini akan mendorong pertumbuhan KPR melalui peningkatan segmen *market pembeli end user* maupun investor. “Untuk kebijakan *LTV*, langkah relaksasi ini menjadi salah satu faktor pendorong bisnis *mortgage* ke depan. Dengan adanya relaksasi *LTV*, dua segmen *market* akan bergerak, yaitu *first time buyer/end user* dan investor,” jelas Direktur Consumer Banking BRI, Handayani.

Handayani menjelaskan, bagi *first time buyer* atau *end user*, pelonggaran *LTV* akan membantu mereka yang selama ini masih terkendala besaran uang muka. Mereka yang mampu membayar cicilan tapi tak punya tabungan untuk menyetorkan uang muka dapat memanfaatkan fasilitas KPR. Sementara, untuk pasar segmen investor juga akan tergerak karena berapa tahun belakangan permintaan sewa cenderung meningkat.

“Anak-anak sekarang, khususnya milenial, banyak yang cenderung lebih suka menyewa. Misalnya saja, mereka beranggapan bekerja di suatu perusahaan tidak lama,

mungkin 2-3 tahun kemudian pindah. Dengan sewa ‘*kan* mereka bisa mudah pindah ke lokasi dengan kantornya. Beda kalau beli. Pilihan sewa juga amat banyak. Nah, peluang ini bisa dimanfaatkan oleh para investor,” kata Handayani.

Selain *LTV*, daya beli masyarakat juga berkorelasi signifikan terhadap permintaan fasilitas pembiayaan *mortgage*. Karena itu, relaksasi *LTV* tetap perlu dibarengi dengan peningkatan daya beli masyarakat dengan terus mendorong peningkatan perekonomian. Daya beli berkorelasi langsung terhadap permintaan properti. Tanpa peningkatan daya beli masyarakat, kebijakan relaksasi *LTV* dikhawatirkan tak terlalu memberi dampak signifikan.

Harus Selektif Memilih Pengembang

Aviliani, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyambut positif kebijakan relaksasi aturan rasio kredit terhadap agunan atau *LTV* yang dirilis BI.

Ia menilai, kebijakan tersebut dapat menggenjot angka penyaluran kredit, khususnya kredit kepemilikan rumah dan properti. “Jadi, sekarang relaksasi BI bagus sekali. Rumah inden boleh KPR.

Itu langkah besar, tapi harus hati-hati juga. Pengembangnya harus dipilih,” terang Aviliani.

Kendati demikian, Aviliani mengimbau pihak pemerintah maupun regulator untuk lebih selektif memilih pengembang yang telah diamanatkan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Hal tersebut guna menghindari terjadinya kredit macet.

“Jadi, harus dipilih pengembangnya. Kalau semua, takutnya itu *enggak* terbangun dalam dua tahun, jadi orang *enggak* mau bayar cicilan *dong*. Jadi, tanggungan bank berat. Ini perlu diperhatikan,” tambah Aviliani. ■



Handayani; pendorong bisnis mortgage

Langkah Tepat, tapi Ada Catatan

Kebijakan makroprudensial yang dilansir BI dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini dinilai sudah tepat, salah satunya pelonggaran *LTV*. Kendati demikian, kebijakan tersebut perlu diikuti langkah lainnya.

Dalam acara Infobank Mortgage Forum yang bekerja sama dengan Perbanas, bertema “Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi *LTV*: Bagaimana Developer & Bank Mengambil Peluang”, Raden Pardede, ekonom CRECO Research Institute, mengatakan bahwa langkah Bank Indonesia (BI) dalam merespons ketidakpastian ekonomi saat ini sudah tepat. Langkah BI yang dimaksud di antaranya menaikkan suku bunga acuan dan relaksasi kebijakan *loan to value (LTV)*.

Langkah tersebut dinilai tepat untuk mendorong permintaan atau kredit perumahan. “Langkah yang diambil BI dan pemerintah perlu berkaitan dengan *LTV* (makroprudensial) sudah dalam arah yang benar. Namun, persoalan perumahan dan kredit tidak akan terjawab tuntas dengan langkah kenaikan *LTV* dan penurunan uang muka saja. Perlu solusi yang lebih komprehensif,” jelas Raden.

Kebijakan yang dikeluarkan BI itu sudah semestinya dimanfaatkan para pelaku usaha. Hal tersebut disampaikan bankir senior sekaligus pendiri Grup Lippo, Mochtar Riady.

“Saya kira kebijakan pelonggaran *LTV* yang telah dilakukan BI jelas sebuah stimulus ekonomi. Ini adalah suatu hal yang sangat positif yang perlu ditanggapi oleh kita semua, dan ini momentum yang baik,” kata Mochtar.

Kendati demikian, dalam pelaksanaannya, BI harus lebih ketat. Hal itu guna mencegah meningkatnya tingkat kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)*.

“Intinya pengawasan harus tetap diperketat. Bank juga tidak boleh langsung jorjoran dan harus lihat profil per debitur. Jangan sampai sekarang *demand KPR* naik, tapi bisa jadi *bubble*, seperti di China karena pasar properti bisa *overheat* dua hingga tiga tahun ke depan dan menimbulkan kredit macet,” terang ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara.



Raden Pardede; sudah tepat

Idealnya, tambah Bhima, *LTV* berada di kisaran 85% hingga 95%, tergantung kemampuan masing-masing bank. Ia menyarankan BI untuk terus memantau efektivitas pelonggaran *LTV* secara periodik.

“Kalau langsung 0% nanti risiko kredit macetnya naik. Saran saya soal kebijakan *LTV* ini juga punya batas waktu. Kalau pertumbuhan kreditnya sudah naik sesuai dengan target bisa diturunkan alias diperketat lagi *LTV*-nya ke 75% hingga 85%,” terang Bhima.

Di luar itu, pelonggaran *LTV* juga dinilai menjadi berkah bagi bank. Bank BTN, misalnya. Pengamat pasar modal, Haryajid Ramelan, menilai, secara fundamental kinerja saham Bank BTN tidak perlu diragukan lagi. Saham yang tahun lalu sempat mengalami kenaikan lebih dari 100% ini termasuk saham yang masih

menjadi skala prioritas pegangan investor institusi, seperti dana pensiun dan manajer investasi (*fund manager*).

Menurut Haryajid, kondisi Bank BTN saat ini sangat diuntungkan dengan relaksasi aturan uang muka kredit rumah yang diterbitkan BI, ditambah juga adanya skema baru dari FLPP atau KPR bersubsidi. Skema barunya yakni KPR FLPP dananya 75% dari pemerintah dan 25% dari PT Sarana Multi Financial (SMF). “Ini tentu menguntungkan BTN dari sisi bisnis sehingga penyaluran KPR akan meningkat,” ucap Haryajid.

Dengan berbagai upaya dan strategi lain yang dilakukan manajemen Bank BTN, misalnya menggenjot dana murah untuk menopang tingkat suku bunga yang rendah, Haryajid menilai seharusnya saham perseroan yang berkode emiten BBTN ini bisa kembali menguat ke zona hijau.

“Penurunan saham BTN karena faktor global seharusnya menjadi peluang bagi investor kembali mengoleksi untuk investasi jangka panjang. Saham merupakan instrumen jangka panjang dan ini juga sudah terbukti bahwa saham perbankan telah banyak memberikan kontribusi keuntungan bagi investor yang mengoleksi untuk jangka panjang,” tegas Haryajid. ■

Relaksasi LTV Tetap Perhatikan Aspek Kehati-Hatian

Kebijakan relaksasi *LTV* yang dijalankan pada Agustus 2018 merupakan bauran kebijakan makprudensial yang diusung BI. Karena itu, prinsip kehati-hatian akan tetap menjadi aspek utama dalam penerapan relaksasi.

Bank Indonesia (BI) menyatakan, pelonggaran kebijakan makprudensial dalam bentuk ketentuan relaksasi rasio *loan to value (LTV)* dan *financing to value (FTV)* untuk fasilitas kredit atau pembiayaan perumahan yang mulai berlaku awal Agustus 2018 tetap memperhatikan aspek-aspek *prudential banking* atau kehati-hatian. Hal itu disampaikan Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Makprudensial BI, Filianingsih Hendarta, dalam Infobank Mortgage Forum yang bekerja sama dengan Perbanas, dengan tema “Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi LTV: Bagaimana Developer dan Bank Mengambil Peluang”, yang diadakan di Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Ia menjelaskan, kebijakan *LTV/FTV* yang dikeluarkan BI merupakan bagian dari bauran kebijakan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian melalui pertumbuhan kredit properti secara nasional yang pada saat ini masih memiliki potensi akselerasi. “Melalui kebijakan ini, BI akan memberikan kewenangan kepada industri perbankan untuk mengatur sendiri jumlah *LTV/FTV* untuk fasilitas kredit atau pembiayaan pertama sesuai dengan analisis bank terhadap debiturnya, serta didasarkan pada kebijakan manajemen risiko masing-masing bank,” jelas Filianingsih.

Dalam menetapkan besaran *LTV/FTV* kepada debitur, masing-masing bank harus memperhatikan pula aspek prudensial dalam penerapannya. Pada penerapannya, hanya bank yang memiliki tingkat kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* di bawah 5% yang dapat memanfaatkan pelonggaran ini. Sejak awal penerbitan ketentuan, kebijakan *LTV* BI telah mengecualikan program perumahan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Melalui landasan dan mekanisme yang ketat, BI menilai implementasi pelonggaran kebijakan *LTV* tidak akan berdampak pada rasio *NPL* bank. Tingkat kredit bermasalah dipastikan relatif terkendali. Bila melihat pengalaman sebelumnya, yakni saat implementasi pelonggaran *LTV* pada Agustus 2016 lalu, bahwa risiko kredit bermasalah untuk



kredit kepemilikan rumah (KPR) masih terjaga.

Memang pada Mei 2018 *NPL* KPR tercatat di level 2,87% dan jika dibandingkan dengan posisi *NPL* KPR sebelum implementasi pelonggaran *LTV* pada Agustus 2016 tercatat lebih rendah, yakni 2,77%. Namun, menurut Filianingsih, angka *NPL* yang tercatat sebesar 2,87% pada Mei 2018 tersebut masih cukup terkendali. Secara keseluruhan total kredit, *NPL* properti mengalami penurunan pada Mei 2018 menjadi 2,79% dibandingkan dengan Agustus 2016 sebesar 3,22%.

Meski cukup terkendali, pada segmen KPR, yang perlu diwaspadai adalah risiko kredit untuk kepemilikan apartemen kurang dari ukuran 21 meter persegi dan ruko/rukan, serta rumah tapak di atas 70 meter persegi yang rasio kredit bermasalahnya meningkat cukup signifikan. Rinciannya, untuk apartemen kurang dari 21 meter persegi, kredit bermasalahnya tercatat 5,66% atau meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi *NPL* pada Agustus 2016 yang tercatat 3,55%. Namun, untuk apartemen ukuran 22-70 meter persegi tercatat menurun menjadi 1,91% pada Mei 2018 dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebesar 2,49%.

Sementara itu, untuk apartemen di atas 70 meter persegi, *NPL*-nya tercatat 1,38% atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi *NPL* Agustus 2016, yakni sebesar 2,18%. Kemudian, untuk ruko/rukan *NPL*-nya tercatat sebesar 4,93% pada Mei 2018 atau meningkat bila dibandingkan dengan posisi Agustus 2016 yang tercatat 4,18%.

Selanjutnya, untuk rumah tapak ukuran kurang dari 21 meter persegi, *NPL*-nya tercatat 3,06% pada Mei 2018 atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi Agustus 2016 yang sebesar 2,93%. Lalu, untuk rumah tapak ukuran 22-70 meter persegi, *NPL*-nya tercatat 2,44% pada Mei 2018 atau lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2016 yang tercatat sebesar 2,69%. Selanjutnya, untuk rumah tapak di atas ukuran 70 meter persegi pada Mei 2018 *NPL*-nya tercatat sebesar 3,33% atau naik tipis bila dibandingkan dengan posisi Agustus 2016 yang tercatat sebesar 3,03%. ■

Tumbuh Kembang dan Tantangan KPR

Kebijakan relaksasi *LTV* dari BI disambut positif kalangan pelaku usaha di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu mengakselerasi KPR.

Bank Indonesia (BI) mengulirkan kebijakan pelonggaran syarat uang muka (*down payment/DP*) untuk kredit pemilikan rumah (KPR) melalui relaksasi kebijakan maksimum nilai kredit atau *loan to value (LTV)*. Kebijakan dari bank sentral ini dinilai berdampak positif bagi industri ke depan, baik bagi perbankan sebagai penyalur pembiayaan maupun bagi perusahaan pengembang. Hal itu terungkap dalam acara Infobank Mortgage Forum yang bekerja sama dengan Perbanas, yang mengusung tema “Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi *LTV*: Bagaimana Developer & Bank Mengambil Peluang”, di Shangri-La Hotel, Jakarta, Kamis, 12 Juli 2018.

Pada acara tersebut Direktur Konsumer Banking Bank Rakyat Indonesia (BRI), Handayani, mengatakan, sektor properti merupakan *leading sector* dan memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional (*output*, pendapatan, dan penyerapan tenaga kerja). Karena itu, upaya regulator dan pemerintah untuk mendorong sektor ini harus didukung.

Menurut Handayani, tak hanya pelonggaran *LTV* yang berpengaruh terhadap sektor ini, daya beli masyarakat pun menjadi salah satu faktor utama. Jika tak ditopang daya beli, efektivitas relaksasi *LTV* akan berkurang.

Handayani meyakini kebijakan BI tersebut mendorong segmen bisnis KPR perbankan, termasuk BRI. “Jadi, kebijakan ini sejalan. Kalau kita longgarkan *LTV* fasilitas kredit (FK) 1 hingga FK 5 ini, *market* bergerak. Untuk memenuhi *size* permintaan KPR. BRI sendiri dalam lima tahun terakhir segmen KPR positif, bahkan *double digit*,” katanya.

Dari data yang dipaparkan Handayani pada acara tersebut, angka rata-rata pertumbuhan kredit KPR BRI dalam lima tahun terakhir sebesar 19,9%. Hingga akhir Juni 2018, *outstanding* segmen KPR BRI telah mencapai Rp24,2 triliun atau tumbuh sebesar 9,02% untuk tahun berjalan (*year to date*).

Pihak BRI menilai, pelonggaran *LTV* tidak akan membuat angka kredit bermasalah atau *non performing loan (NPL)* perbankan membengkak. Pasalnya, hingga Juni 2018, *NPL*



Suryanti Agustinar; beberapa alternatif

KPR BRI tercatat hanya sebesar 2,7%, masih di bawah angka *NPL* industri yang sebesar 2,8%.

“Kalau kita longgarkan *LTV* nantinya akan berikan relaksasi kebutuhan pembiayaan rumah, tapi satu sisi ada konsekuensi terhadap *NPL*. Namun, faktanya, *NPL*-nya lebih baik. Bahkan, kami di bawah industri,” tukas Handayani.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Consumer Banking Bank Tabungan Negara (BTN), Budi Satri, memaparkan tentang kebutuhan pembiayaan properti nasional yang masih besar dan bank masih menjadi sumber pembiayaan, baik bagi perusahaan pengembang (*developer*) maupun masyarakat konsumen. Untuk perusahaan pengembang, sumber pembiayaan bank

porsinya sebesar 23,16% untuk pembangunan properti. Sedangkan bagi konsumen, pemanfaatan KPR porsinya sebesar 75% sebagai sumber pembelian properti.

Kendati demikian, bank memiliki tantangan terkait dengan sumber pendanaan, yakni umur (*maturity*) KPR yang panjang, sementara pendanaannya jangka pendek dari giro, tabungan, dan deposito. Rendahnya pertumbuhan kredit sepanjang 2017 mendorong perusahaan pengembang mencari sumber lain, misalnya dengan menerbitkan saham, obligasi, ataupun *medium term notes (MTN)*, yang jumlahnya mencapai Rp309,8 triliun pada 2017.

Menurut Ketua Komisi Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA) Perbanas, Suryanti Agustinar, ada beberapa alternatif bagi bank untuk mendapatkan sumber pendanaan, seperti pinjaman bilateral dan penerbitan surat berharga. Alternatif lainnya, melalui sekuritisasi aset atau efek beragun aset (EBA). Hingga saat ini, hanya BTN dan Bank Mandiri yang terlibat dalam transaksi sekuritisasi.

Sejauh ini ada beberapa tantangan bagi bank dalam transaksi EBA. Tantangan yang dimaksud di antaranya aset yang dijual merupakan piutang dengan kualitas terbaik yang belum tentu tergantikan dengan penyaluran kredit baru, sekuritisasi aset dapat memperlambat pertumbuhan aset bank, serta biaya dan proses penerbitan transaksi sekuritisasi yang lebih mahal dan lebih panjang dibandingkan dengan alternatif sumber lain, seperti obligasi. ■

Fransisca Nelwan Mok,
Direktur ICBC Indonesia, Anggota Bidang
Hubungan Masyarakat Perbanas, Komite
Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP)

Selaras dengan Risk Appetite dan Expertise Bank

Pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi lainnya yang tengah dipacu pemerintah saat ini menjadi potensi bagi industri perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Setiap bank harus bisa menyesuaikan dengan *risk appetite* dan keahlian (*expertise*) masing-masing.

Perekonomian Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Pembangunan berbagai sektor pun terus diupayakan. Tentu ini menjadi peluang bagi pelaku industri perbankan untuk mengakselerasi bisnisnya, termasuk penyaluran kredit.

Salah satunya peluang dari pembangunan infrastruktur yang tengah digiatkan pemerintah saat ini. Namun, tentu tidak semua bank bisa membiayai proyek infrastruktur dan tidak semua proyek infrastruktur sesuai untuk suatu bank.

Menurut Fransisca Nelwan Mok, Direktur Bank ICBC Indonesia, bank dalam melakukan pembiayaan guna menunjang perekonomian harus menilai setiap proyek apakah sesuai dengan *risk appetite* dan *expertise* masing-masing. Setiap ada proyek yang sedang berkembang sebaiknya bank jangan lantas asik ikut bermain karena melihat peluang terbuka lebar





tanpa melihat kemampuan yang dimiliki oleh bank tersebut sehingga bank harus tetap berhati-hati dengan mempertimbangkan *risk appetite* dan keahlian masing-masing.

Kredit infrastruktur secara nilai memang sangat besar, tapi penarikan (*drawdown*) kredit infrastruktur memiliki jangka waktu yang panjang. Bahkan, pencairannya bisa mencapai tiga tahun sampai lima tahun. Padahal, pengukuran pertumbuhan kredit hanya dilakukan berdasarkan nilai yang telah dicairkan.

“Banyak bank yang sudah berkomitmen dengan proyek infrastruktur tapi belum juga melihat penarikan kreditnya. Oleh karena itu, target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan kredit secara dua digit tidak bisa diraih hanya dengan mengandalkan infrastruktur,” terang Fransisca.

Bagaimana perbankan seharusnya menyikapi hal tersebut? Berikut wawancara lengkap Majalah *Probank* dengan Fransisca. Petikannya:

Bagaimana kondisi industri perbankan saat ini menurut Anda?

Menurut saya, situasi industri perbankan saat ini terus membaik. Dengan pengalaman dan berjalannya waktu, bank mulai mengatur strateginya masing-masing sesuai dengan fokus masing-masing bank. Semua ini menjadi pembelajaran buat kita. Seperti beberapa waktu lalu, waktu terjadi kenaikan di industri komoditas semua berlomba-lomba masuk ke komoditas. Ternyata, begitu ada *turn around* harga komoditas mengakibatkan semua panik.

Sekarang dengan masing-masing bank yang telah mengatur posisi dan melihat di mana kekuatan utamanya, menyebabkan mereka mengambil posisi mundur sedikit guna menyusun langkah yang lebih strategis. Namun, langkah tersebut tidak dapat dilakukan sendiri. Indonesia dengan segala tenaga dan daya upaya, baik dari sisi pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan semua pihak ikut menjaga stabilitas negeri ini tetap terjaga dengan baik.

Upaya pemerintah dan regulator untuk mendorong pertumbuhan kredit sudah cukup atau masih ada penyempurnaan yang perlu ditindaklanjuti?

Pemerintah sekarang ini jauh lebih komunikatif, artinya kalau ada sesuatu yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi maka mengajak industri, untuk duduk bersama. Itu salah satu

hal positif yang ada saat ini, karena hal tersebut sejatinya mencari solusi bersama sehingga bisa melakukan upaya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Menurut saya, ini salah satu terobosan pemerintah yang patut untuk diapresiasi.

Berkaca pada masa lalu, ada anggapan bahwa terdapat polarisasi adanya krisis perbankan “sepuluh tahunan”. Ada Pakto 1988, krisis moneter 1998, dan terakhir krisis 2008. Dengan tahun 2018 yang tinggal sedikit lagi akan berakhir, kita harapkan semua bisa menghadapi tantangan dengan lebih baik. Walaupun sekarang kurs dolar AS sudah menguat, tapi masih dalam kondisi yang terkendali dengan adanya perbaikan fundamental ekonomi Indonesia saat ini.

Tidak mudah memang bagi seorang bankir untuk mengalami semua itu. Akan tetapi, kalau kita semua berpikir positif dan optimistis serta mempunyai kerjasama tim yang baik, maka kita akan bisa mengatasinya secara bersama. Rasanya dalam pengalaman saya mengalami beberapa kali krisis, seharusnya kita bisa mengantisipasi dan menenangkan situasi sepanjang kita punya tujuan yang jelas dan tekad yang kuat, dikomunikasikan dengan baik ke bawah, serta juga harus ada *role model* dari atas guna penyalarsan tujuan.

Terkait dengan target pertumbuhan kredit *double digit* yang dicanangkan pemerintah pada 2018, apakah dapat tercapai?

Saya tidak berani berkomentar karena tentunya saya tidak tahu isi dapur semua bank. Kalau dilihat dari sisi infrastruktur, ada begitu banyak proyek. Tapi, realitanya secara rata-rata tidak semua proyek akan langsung digarap. Misalkan, bank menyetujui sebuah proyek infrastruktur, bahwa pinjaman proyek infrastruktur itu tidak semuanya langsung dicairkan.

Proyek infrastruktur adalah proyek jangka panjang, bisa tiga tahun atau lima tahun baru dicairkan. Sedangkan pengukuran pertumbuhan kredit menggunakan acuan kredit yang sudah dicairkan. Sehingga, meskipun kredit infrastruktur yang disetujui jumlah dan nilainya banyak, tapi pencairan tidak langsung besar, melainkan bertahap.

Hal-hal seperti itu tentunya juga harus menjadi pertimbangan. Berbeda dengan proyek *short term* yang pencairannya cepat sehingga mungkin bisa sangat membantu angka pertumbuhan kredit tahun berjalan. Akan tetapi, sekarang ini yang banyak adalah proyek infrastruktur

multiyears yang betul-betul panjang jangka waktunya.

Bagaimana dengan kinerja ICBC pada 2018?

Walaupun ICBC bank yang terbesar di dunia, di Indonesia baru mulai beroperasi di 2007, jadi umurnya baru memasuki sepuluh tahun. Meskipun masih terhitung baru, perkembangan total asetnya sudah mencapai Rp50 triliun. Baru-baru ini juga mulai masuk ke BUKU 3.

Dengan adanya pergantian pimpinan ICBC Indonesia pada saat ini, maka kami sekarang sedang menyusun strategi kembali *corporate plan*. Alhasil, karena kami membentuk *impairment* yang cukup besar sehingga laba turun dibandingkan tahun sebelumnya. Kami akan tetap melakukan komitmen sesuai dengan regulasi yang berlaku.

ICBC Indonesia, secara keseluruhan setelah melihat kondisi juga mulai fokus dalam beberapa sektor karena secara induk kami kuat di korporasinya. Kami juga melihat proyek-proyek infrastruktur yang sesuai dengan *appetite* dan *skill* yang kami miliki, baik pembiayaan sendiri maupun dengan sindikasi bersama bank-bank lain.

Selain itu, kami banyak proyek yang bekerja sama dengan investor-investor dari Tiongkok yang mau datang berinvestasi ke Indonesia. Begitu juga sebaliknya, jika ada nasabah Indonesia yang ingin berinvestasi ke Tiongkok, akan kami fasilitasi. Istilahnya kami menjadi jembatan bagi para investor.

Di luar korporasi, kami masih dalam tahap membangun. Karena, baik secara infrastruktur, IT, maupun dalam jumlah cabang kami baru 19. Kami belum mempunyai kapasitas yang cukup untuk masuk ke retail secara massal. Terkait dengan perkembangan teknologi, ICBC Indonesia juga masih mendiskusikan apakah jumlah cabang 19 ini perlu ditambah

atau tidak? Atau dapat pula nantinya kami akan menerapkan *branchless banking*. Itu juga yang saat ini sedang dipersiapkan dalam penyusunan strategi kami. Menurut saya, mau tidak mau semua perbankan harus masuk ke arah digitalisasi.

Sebagai asosiasi perbankan, bagaimana peran Perbanas saat ini?

Perbanas sekarang menurut saya jauh lebih aktif dan pembagian tugasnya lebih jelas. Secara rutin telah melakukan pertemuan dan mempunyai waktu khusus dengan regulator. Dalam situasi seperti ini, sangatlah penting mengedepankan komunikasi karena komunikasi yang berjalan, dengan instansi mana pun atau dengan regulator, menjadikan informasi bisa disalurkan dan dikomunikasikan lebih tepat sasaran. Bersinergi dengan regulator dan menjadi wadah di mana asosiasi ini dapat berdiskusi dengan regulator secara baik.

Selain sebagai anggota pengurus bidang hubungan masyarakat, saya di Perbanas juga berada di bagian Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP). Layaknya program *corporate social responsibility* (CSR) di perusahaan, KMPP tidak hanya bersinggungan dengan kegiatan sosial akan tetapi di KMPP, kami juga sering berdiskusi, apa nilai lebih yang bisa diberikan untuk masyarakat.

Contohnya beberapa waktu lalu, dalam kegiatan pemulihan pascabencana, bersamaan dengan program membangun sekolah. Program dari regulator “Ayo Menabung” juga kami sertakan di dalam kegiatan tersebut. Kebetulan program tersebut dilakukan di sekolah, jadi program literasi ini bisa berjalan berbarengan. Kami menanamkan kepada mereka untuk peduli menabung sejak dini. ■

Legacy Membangun Talenta Berkualitas

Sumber daya manusia (SDM) adalah satu dari sekian banyak tantangan yang harus mendapatkan perhatian dari setiap institusi perbankan. Agar bisa terus bersaing dan tumbuh berkesinambungan pada masa yang akan datang, tentunya bank harus mempersiapkan pemimpin dan talenta-talenta berkualitas sebagai upaya merespons tantangan mendatang.

Memang membangun talenta yang memiliki integritas dan kompetensi mumpuni tidaklah mudah. Namun, bagi Fransisca Nelwan Mok, Direktur ICBC Indonesia, mengembangkan sosok pemimpin atau talenta masa depan bukanlah sebuah beban. Ini telah menjadi *legacy* yang diupayakannya untuk membuat industri dan ekonomi menjadi makin baik.

“Saya senang membina talenta-talenta baru, tidak hanya untuk industri perbankan, tapi di bidang mana saja. Saya bangga jika talenta yang saya bina berhasil menjadi direktur di perusahaan apa pun itu, tidak harus bank. Itu berarti kita bisa mengatasi masalah sumber daya manusia,” kata mantan direksi wanita pertama Bank Mandiri ini kepada *Probank*.

Dalam kondisi bisnis saat ini, tidak sedikit mantan bankir muda yang dapat berprestasi di perusahaan nonbank atau nonkeuangan. Itu membuktikan bahwa industri perbankan sudah dapat mengatasi persoalan SDM untuk industri. Bahkan, sudah ikut menyumbangkan talenta berkualitas untuk industri lainnya.

Selama 35 tahun berkarier di Industri perbankan, tentunya ibu tiga anak ini sudah banyak merasakan asam garam industri perbankan. Krisis ekonomi siklus sepuluh tahunan, semua sudah pernah ia rasakan, semisal krisis moneter 1998 dan krisis perekonomian global 2008. Pengalaman yang telah ia rasakan sendiri ini tentunya bisa menjadi pelajaran berharga bagi generasi masa depan dalam menghadapi krisis baru yang boleh jadi akan muncul.

Kesempatan berbagi inilah yang membuat Fransisca kembali melanjutkan profesinya sebagai bankir setelah pensiun dari Bank Mandiri dan menerima pinangan ICBC Indonesia. Wanita yang mengawali kariernya di Bank Bumi Daya ini pun mengaku sangat menikmati pekerjaannya di ICBC Indonesia. Baginya, meskipun tantangan yang dihadapi besar, ia dapat melaluinya dengan baik. Pasalnya, setiap pekerjaan dilakukan dengan sepenuh hati dan memiliki kerja sama dan membangun tim yang selalu penuh dengan semangat optimistis.

Kesiapan Perbankan Nasional Menghadapi Disrupsi

Era disrupsi masih akan terus berlangsung hingga masa mendatang. Berdasarkan hasil survei PwC Indonesia, perbankan nasional dinilai sudah cukup siap menerapkan berbagai strategi guna menghadapi tantangan tersebut.

Kemajuan teknologi mendorong perubahan perilaku manusia. Hal ini juga berdampak pada perubahan industri ke arah digitalisasi. Pada akhirnya, para pelaku usaha tak bisa menghindar dari disrupsi digital yang tengah berlangsung, termasuk industri perbankan.

Disrupsi digital telah menjadi faktor penggerak bagi pelaku industri perbankan Indonesia untuk mempertimbangkan jalur digital sebagai bagian dari strategi mereka. Alhasil, perbankan digital kini telah menjadi strategi umum di industri perbankan.

Terkait dengan perkembangan tersebut, PwC Indonesia meluncurkan edisi pertama *Survei Perbankan Digital terhadap Bank-Bank di Indonesia* (Digital Banking Survey of Indonesian Banks). Sebagai informasi, PwC Indonesia terdiri atas KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, PT PricewaterhouseCoopers Indonesia Advisory, PT Prima Wahana Caraka, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia, dan Melli Darsa & Co., Advocates & Legal Consultants, masing-masing sebagai entitas hukum yang terpisah dan semuanya membentuk firma anggota Indonesia jaringan global PwC yang secara bersama-sama disebut sebagai PwC Indonesia.

Survei PwC Indonesia mencoba mengumpulkan dan merangkum berbagai pandangan dari para bankir eksekutif senior di industri perbankan nasional. Menurut Chairil Tarunajaya, *Technology and Risk Consulting Leader* PwC Indonesia, survei ini berfokus pada enam bidang utama, termasuk strategi digital dan model-model operasional, tenaga kerja dan keterampilan digital, teknologi dan inovasi berkembang, pengalaman nasabah, analisis digital dan pengambilan keputusan, serta risiko-risiko dan tantangan-tantangannya.

Berdasarkan survei tersebut, PwC menilai sebesar 66% responden bankir mengindikasikan bahwa mereka telah mengembangkan strategi digital sebagai bagian dari strategi



Digital lounge; strategi sektor perbankan

perusahaan. “Bank-bank telah menjadikan strategi digital sebagai bagian dari strategi perusahaan. Kami mendapati bahwa sebagian besar bank di Indonesia telah mengikutsertakan sejumlah inisiatif digital sebagai bagian dari strategi perusahaan mereka, yakni sekitar 66% responden survei mengindikasikan demikian,” terang Chairil di Jakarta, pada pertengahan Juli 2018.

PwC Indonesia juga mendapati bahwa sebagian besar bank di Indonesia, mulai dari bank pembangunan daerah (BPD), bank-bank *joint venture*, bank-bank lokal, bank-bank badan usaha milik negara (BUMN), hingga bank-bank syariah, telah mengikutsertakan sejumlah inisiatif digital sebagai bagian dari strategi perusahaan mereka.

“Kami melihat perbedaan yang besar antara bagaimana bank-bank besar dan bank-bank BUMN memandang strategi digital dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Menurut survei kami, hanya 38% bank-bank BUMN dan 44% dari bank-bank BUKU (bank umum kegiatan usaha) 4 yang telah memasukkan strategi digital sebagai bagian dari strategi

perusahaannya. Hal ini mungkin merupakan indikasi bahwa bank-bank besar telah memulai perjalanan menuju transformasi digital. Namun, masih ada tantangan-tantangan dalam mengembangkan pandangan yang sama tentang strategi digital di bank-bank ini,” ujar Chairil.

Survei tersebut juga mencatat sebesar 12% responden mengindikasikan bahwa mereka menciptakan strategi digital sebagai bagian dari strategi teknologi informasi (*information technology/IT*) institusi tersebut. “Kami yakin, para bankir, penggemar teknologi digital, usaha-usaha rintisan atau *fintech* (*financial technology*), dan para pembaca lain publikasi ini dapat memperoleh wawasan dari hasil dan analisis dalam survei ini,” jelas Chairil.

Selanjutnya, sekitar 16% responden telah menyertakan strategi digital sebagai bagian dari strategi produk atau nasabah mereka. Dari survei ini juga bisa dilihat bahwa hanya 4% responden yang mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki dokumen strategi digital terpisah yang berdiri sendiri. Respons ini menunjukkan penerimaan strategi digital sebagai strategi usaha, dan bukan semata-mata inisiatif IT.

Hasil survei tersebut juga menunjukkan bahwa saat ini telah bermunculan perusahaan-perusahaan teknologi yang bisa menjadi pesaing industri perbankan. Indonesia saat ini berada di tengah *booming* sektor *e-commerce* dan pembayaran, yakni banyaknya perusahaan dalam negeri dan wilayah yang memimpin gerakan digital ini.

Tak mengherankan bila mayoritas bankir Indonesia (sekitar 72%) menganggap Go-Jek sebagai salah satu pesaing baru dengan fasilitasnya, yaitu Go-Pay dan layanan-layanan lainnya. Sekitar 62% bankir Indonesia meyakini bahwa Alibaba dengan fasilitasnya, yaitu Alipay dan layanan-layanan lainnya, merupakan kekuatan besar yang harus dihadapi dan dapat muncul sebagai pesaing berat bagi industri perbankan dalam waktu dekat.

“Kita juga berharap untuk melihat pada tahun-tahun mendatang. Ekspansi layanan digital dari perusahaan-perusahaan telekomunikasi dapat semakin memperkuat solusi-solusi dompet elektronik (*mobile wallet*)/uang elektronik (*mobile money*) mereka. Hal ini mungkin menimbulkan persaingan ketat atau kolaborasi efektif dengan bank-bank dan perusahaan-perusahaan teknologi,” jelas Santoso Widjaja, PwC Indonesia *Consulting Director*.

Risiko dan Tantangan

Menurut Global Economic Crime and Fraud Survey PwC Tahun 2018, kejahatan dunia maya atau siber telah lama melewati fase awal dan pertengahan. Fase matang dari kejahatan siber ini memerlukan cara pandang baru terhadap sifat multiaspek dari ancaman siber dan ancaman-ancaman lainnya yang mengikuti.

Menurut para bankir Indonesia dalam survei tersebut, ancaman-ancaman keamanan siber adalah risiko terbesar terhadap usaha digitalnya. Kehilangan tenaga terampil karena kalah berkompetisi adalah risiko besar berikutnya. Perubahan-perubahan pesat terhadap teknologi, inisiatif-inisiatif perbankan digital dari bank-bank kompetitor, dan *fintech* menjadi risiko terbesar ketiga.

Kesimpulan Survei

- Ancaman-ancaman keamanan dunia maya mempunyai risiko besar terhadap usaha digital dalam dua-tiga tahun ke depan.
- Sebanyak 44% responden mengindikasikan bahwa tujuan utama dari strategi digital mereka adalah meningkatkan pengalaman nasabah dan karyawan mereka.
- Sekitar 56% responden mengindikasikan bahwa mereka telah menetapkan target lebih dari 5% untuk kontribusi pendapatan di masa depan dari inisiatif digital mereka.
- Sebanyak 66% responden mengindikasikan bahwa mereka telah mengembangkan strategi digital sebagai bagian dari strategi perusahaannya.
- Sebanyak 72% responden mengindikasikan bahwa Go-Jek adalah bisnis baru yang merupakan pesaing serius bagi perbankan Indonesia.

Terkait dengan inovasi digital perbankan Indonesia yang masih berada di tahap awal, organisasi-organisasi manajemen risiko masih mencoba mengevaluasi dampak digital terhadap praktik-praktik risiko perusahaan saat ini dan dalam proses meningkatkan keterampilan timnya agar siap menghadapi masa depan.

Tanggung jawab manajemen risiko terhadap inisiatif-inisiatif digital masih terbagi di kalangan perbankan Indonesia, yakni sekitar 60% responden menganggap bahwa tim risiko dan kepatuhan (*risk and compliance*) bertanggung jawab mengelola berbagai risiko dari inisiatif-inisiatif digital. Sementara, hampir 30% responden meyakini bahwa tanggung jawab manajemen risiko terbagi di antara tim bisnis digital/pemilik produk dan *chief information officer* (CIO).

“Semakin sengitnya persaingan dalam lingkungan usaha yang bertemu dengan beragamnya solusi teknologi mengindikasikan bahwa strategi teknologi yang benar sangatlah penting dalam mendukung pertumbuhan suatu usaha. PwC Indonesia telah mengembangkan pendekatan penyelenggaraan jasa untuk menetapkan dan menerapkan strategi teknologi tersebut. Pendekatan ini menempatkan teknologi sebagai faktor pendukung strategis dan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi perusahaan dari organisasi tersebut,” terang Marina Tusin, *consulting leader* PwC Indonesia. ■

Tumbuh Ditopang Investasi Infrastruktur

Faktor kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan Amerika Serikat serta ketegangan kawasan menciptakan risiko ketidakpastian global dan menimbulkan gejolak di banyak negara. Namun, di tengah tekanan perekonomian global tersebut, kinerja perekonomian Indonesia sampai dengan pertengahan 2018 menunjukkan pertumbuhan yang positif.

Kinerja perekonomian Indonesia sejak awal 2018 sampai dengan pertengahan tahun ini meningkat dibandingkan dengan periode yang sama 2017. Laporan yang dikeluarkan Kementerian Keuangan menunjukkan, pertumbuhan ini ditopang oleh kinerja investasi yang tumbuh cukup kuat seiring dengan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Peningkatan aktivitas investasi juga sejalan dengan pertumbuhan *double digit* impor yang didorong oleh kenaikan impor barang modal bahan baku pendukung infrastruktur, seperti traktor, bulldoser, *crane*, dan besi baja. Hal itu mengindikasikan adanya peningkatan gairah aktivitas investasi dan perdagangan.

Daya beli masyarakat juga tetap stabil seiring dengan terkendalinya tingkat inflasi, termasuk pada periode Ramadan dan Idulfitri. Dari sisi produksi, seluruh sektor tumbuh positif pada triwulan pertama 2018. Kinerja pertumbuhan ini ditopang oleh sektor-sektor kunci, seperti industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, serta jasa.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi pada semester pertama secara umum juga didukung dengan makro-ekonomi Indonesia yang stabil, antara lain tercermin dari pergerakan inflasi. Indeks harga konsumen (IHK) sepanjang semester pertama 2018 rendah dan terkendali. Laju inflasi pada Januari sampai dengan Juni 2018 tercatat sebesar 1,90% (*year to date/yttd*) atau 3,12% (*year on year/yooy*), lebih rendah dibandingkan dengan capaian periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, dampak kebijakan fiskal dan moneter Amerika Serikat (AS) dan sentimen penerapan kebijakan proteksionisme menyebabkan mata uang negara-negara dunia



Sri Mulyani Indrawati; asas kehati-hatian

mengalami depresiasi terhadap mata uang dolar AS, termasuk nilai tukar rupiah. Lebih lanjut laporan tersebut juga menyatakan, di sisi fiskal pemerintah akan melanjutkan pengelolaan fiskal yang kredibel dan produktif. Selain itu, pemerintah akan fokus pada penguatan struktur ekonomi, antara lain dengan mendorong ekspor dan investasi. Kebijakan fiskal dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 berada dalam jalur yang tepat serta kredibel sehingga turut mendukung stabilitas perekonomian.

Dengan kinerja perekonomian yang bergerak positif, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni 2018 cukup tinggi, sebesar US\$119,8 miliar. Memang, jika dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2018 yang di US\$122,9 miliar, cadangan devisa kita sedikit lebih rendah. Penurunan cadangan devisa pada Juni 2018 terutama dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

Dalam siaran pers yang diterbitkan Bank Indonesia (BI) pada 6 Juli 2018, posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 7,2 bulan impor atau 6,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Ini berarti cadangan devisa kita berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro-ekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung keyakinan terhadap stabilitas dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik serta kinerja ekspor yang tetap positif.

Ditambah lagi, dalam rilis berbeda, BI mengungkapkan, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2018 juga mencatatkan surplus US\$1,7 miliar. Capaian ini cukup membanggakan mengingat bulan sebelumnya neraca perdagangan defisit US\$1,5 miliar. Dengan perkembangan tersebut, secara kumulatif Januari-Juni 2018, neraca perdagangan Indonesia mencatat defisit US\$1,0 miliar.



Pembangunan infrastruktur; investasi meningkat

Defisit neraca perdagangan minyak dan gas (migas) menurun seiring dengan meningkatnya ekspor yang disertai penurunan impor. Defisit neraca perdagangan migas tercatat US\$0,4 miliar pada Juni 2018, turun dari US\$1,2 miliar pada Mei 2018. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan ekspor migas sebesar US\$0,1 miliar (*month to month/mtm*) yang disertai dengan penurunan impor migas sebesar US\$0,7 miliar (*mtm*).

Perbaikan tersebut didukung oleh surplus neraca perdagangan nonmigas. Neraca perdagangan nonmigas mencatat surplus US\$2,1 miliar pada Juni 2018, terutama karena turunnya impor nonmigas.

Penurunan impor nonmigas tercatat US\$5,7 miliar (*mtm*), terutama didorong oleh penurunan impor mesin dan pesawat mekanik, mesin dan peralatan listrik, besi dan baja, plastik dan barang dari plastik, serta bahan kimia organik. Sementara itu, ekspor nonmigas turun US\$3,3 miliar (*mtm*), terutama karena penurunan ekspor kendaraan dan bagiannya, mesin dan peralatan listrik, mesin dan pesawat mekanik, kayu dan barang dari kayu, serta karet dan barang dari karet.

“Bank Indonesia (BI) memandang bahwa kinerja neraca perdagangan Juni 2018 positif dalam mendukung kinerja transaksi berjalan. Ke depan, BI terus mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik yang dapat memengaruhi kinerja neraca perdagangan serta mengupayakan agar kegiatan ekonomi domestik terus berjalan dengan baik,” rilis BI per 16 Juli 2018.

APBN Positif

Kondisi makro-ekonomi yang membaik juga ditopang oleh perbaikan kinerja realisasi anggaran 2018. Perbaikan kualitas anggaran ini terlihat dari membaiknya pendapatan

negara, yang tercermin dari meningkatnya aktivitas perekonomian dan pola pelaksanaan belanja negara yang positif.

Angka realisasi penerimaan pendapatan negara dan hibah semester pertama (sampai dengan 30 Juni 2018) APBN 2018 mencapai Rp833,45 triliun, atau 44% dari target APBN 2018. Capaian ini menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017.

Peningkatan ini ditopang oleh kinerja penerimaan perpajakan yang merata, baik dari pajak penghasilan (PPh) migas, pajak nonmigas, maupun penerimaan kepabeanan dan cukai. PPh migas tumbuh 9%, yaitu sebesar Rp30 triliun atau 78,8% dari target. Untuk pajak nonmigas tumbuh 14,3%, yaitu tercapai Rp551,5 triliun atau 39,8% dari target tahun ini.

Begitu pula dengan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tumbuh 13,%, dengan realisasi sebesar Rp218 triliun atau lebih tinggi daripada tahun lalu yang mencapai Rp192 triliun. Penurunan terjadi hanya pada pajak bumi dan bangunan (PBB) yang pertumbuhannya negatif 60,4%, yaitu terealisasi sebesar Rp0,3 triliun atau 1,7% dari target tahun ini.

Sementara itu, realisasi pajak lainnya tercatat Rp38,5 triliun atau tumbuh 17,4%. Kemudian, untuk penerimaan dari kepabeanan dan cukai pertumbuhannya juga sangat tinggi, bahkan dalam tiga tahun terakhir. Penerimaan cukai tumbuh 15%, yaitu tercapai Rp51 triliun atau 32,8% dari target tahun ini. Bea masuk tumbuh 13% dan bea keluar tumbuh 93,8%.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengemukakan, capaian ini menunjukkan dinamika dan kegiatan ekonomi Indonesia telah bergerak ke arah yang diinginkan. Namun, ia menegaskan akan terus mengedepankan asas kehati-hatian dalam pengelolaan APBN 2018 dengan terus berkoordinasi dengan seluruh lembaga keuangan guna mengantisipasi ketidakpastian global.

“Kinerja positif menunjukkan momentum peningkatan ekonomi masih berlanjut, meski ada risiko ketidakpastian global dan arah kebijakan negara maju dan mitra ekonomi Indonesia,” tukas Sri Mulyani. ■



ACCOUNTING COMPETITION

**“CHALLENGING YOUR EXCELLENCE, IMPROVING YOUR COMPETENCE,
AND SHOWING YOUR GREATEST ACCOUNTING CAPABILITIES
THROUGH PAC XVIII”**

Registration Preliminary:

30th July 2018 - 14th September 2018

FEE:

FREE!!!

Preliminary online:

15th September 2018

Re- registration after Preliminary:

17th September - 24th September 2018

FEE:

IDR 700.000,- / Team

**Tuesday- Thursday
9th - 11th October 2018
Auditorium Unit III
Perbanas Institute**

**TOTAL PRIZE
“IDR 33.000.000,-”**

ECONOMIC SEMINAR

**“MANDATORY DISCLOSURE RULE: THE PERFECTION OF INDONESIA
TAX REGULATIONS IN PREVENTING TAX AVOIDANCE”**

TICKET

PRICE

IDR 60.000,-

Include:

Lunch

Certificate

Doorprize

Goodie Bag

Tuesday, 9th October 2018

Auditorium Unit III, Perbanas Institute

For Further Information:

☎ Vini : 082157284707

📱 viniutami

📷 himapacxviii

🌐 www.pac.perbanas.id

SUPPORTED BY:



SPONSORED BY:



Uluran Industri Keuangan untuk Lombok

Gempa bumi yang melanda Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada 29 Juli 2018, mengakibatkan kerusakan yang cukup parah. Untuk meringankan penderitaan korban bencana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan memberikan bantuan melalui program “OJK Bersama Industri Jasa Keuangan Peduli Gempa Lombok”. Bantuan tersebut diserahkan Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisiner OJK, pada 13 Agustus 2018, di Lapangan Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Melalui program tersebut, OJK dan industri jasa keuangan berhasil menghimpun dana sebesar Rp8.384.433.830. Perincian penggunaannya, Rp1.000.000.000 untuk pemulihan fasilitas umum; Rp3.074.706.830 dalam bentuk uang tunai yang digunakan untuk badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Provinsi NTB (Rp2.474.706.830), Desa Bentek (Rp300.000.000), dan Desa Rempek (Rp300.000.000); serta Rp4.309.727.000 dalam bentuk bantuan logistik dan dana tunai yang telah didistribusikan.

Terkait dengan kerugian akibat gempa Lombok, Wimboh mengatakan bahwa OJK sudah memiliki data sementara mengenai jumlah nasabah industri jasa keuangan dan potensi kerugiannya. “OJK sedang menyiapkan kebijakan yang bisa dikeluarkan untuk meringankan para nasabah tadi,” tambah Wimboh. Per 10 Agustus 2018 OJK NTB mencatat bahwa nasabah bank umum yang menjadi korban bencana gempa Lombok mencapai 34.668 nasabah dengan nilai kredit Rp1,25 triliun. Nasabah tersebut berasal dari 15 bank umum. Sedangkan, untuk bank perkreditan rakyat (BPR), tercatat ada 1.214 nasabah dengan nilai kredit Rp46,16 miliar dari 11 BPR. PT Pegadaian mencatatkan kerugian sebesar Rp50 miliar akibat bencana gempa tersebut.

Kepedulian Perbanas dengan terlibat dalam program OJK ini dilakukan oleh Komite Masyarakat Perbankan Peduli (KMPP) Perbanas. KMPP Perbanas memberikan bantuan sebesar Rp250 juta melalui program OJK tadi. Perbanas Nusa Tenggara Barat (NTB) juga menggalang bantuan untuk korban bencana Lombok. Pada 9 Agustus 2018 Pengurus dan perwakilan anggota Perbanas NTB menyerahkan bantuan sebesar Rp35 juta. Rinciannya, sebesar Rp30 juta diberikan dalam bentuk barang dan Rp5 juta untuk biaya pengangkutan ke Lombok Utara dan Lombok Timur. ■



RUA Perbanas 2018 Sahkan Laporan Keuangan 2017

Sebagai organisasi yang transparan dan akuntabel, Dewan Pengurus Perbanas menyelenggarakan RUA. Salah satu agendanya, mempertanggungjawabkan laporan keuangan.

Pada 28 Juni 2018 Perbanas menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) dengan agenda membahas laporan tahunan. Anggota Perbanas yang hadir dalam RUA tersebut secara musyawarah dan mufakat menyetujui, menerima baik, dan mengesahkan laporan keuangan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Taslim dan Rekan dan mendapatkan predikat “wajar”.

Sebelum rapat tersebut digelar, kegiatan dimulai dengan “Bankers’ Discussion Forum” yang menghadirkan pembicara Suhasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia (RI) dan Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedua narasumber tersebut memberikan *update* kondisi terkini terkait dengan industri keuangan dari sisi pemerintah dan regulator.

Rapat yang dipimpin Ketua Umum Perbanas, Kartika Wirjoatmodjo, ini dihadiri 55 anggota atau 71,4% dari total 77 anggota Perbanas. Isi pokok laporan tahunan dibacakan oleh Danny Hartono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perbanas, yang menyampaikan laporan kegiatan dan Tiolina Tumanggor, Wakil Bendahara Umum Perbanas yang menyampaikan laporan keuangan.

Danny mengungkapkan, sepanjang 2017 Perbanas telah melakukan serangkaian kegiatan yang diwakili oleh berbagai bidang di dalamnya. Bidang Sekjen, misalnya, pada 2017 menyelenggarakan acara halalbihalal, CEO Forum, dan RUA. Selain itu, hadir mewakili Perbanas dalam berbagai kesempatan untuk memberikan masukan dan diskusi terkait dengan permasalahan perbankan.

Sementara itu, Bidang Organisasi Perbanas menerbitkan surat keputusan mengenai petunjuk pelaksanaan rapat anggota daerah dan surat keputusan pengurus daerah sebanyak 16 Perbanas daerah. Untuk Bidang Pengkajian dan Pengembangan Perbankan, kegiatan yang dilakukannya pada 2017 adalah merumuskan *guideline* program kerja komisi yang berada di bawahnya.

Di lain pihak, Bidang Governance, Pendidikan, dan Pengembangan SDM banyak memberikan masukan kepada regulator. Misalnya, masukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Surat Edaran (SE) OJK tentang remunerasi.



Juga, kepada BI mengenai jenjang kualifikasi jabatan untuk penyusunan kerangka kualifikasi nasional Indonesia.

Sementara itu, Bidang Hukum melakukan *review* atas seluruh akta dan izin seluruh yayasan yang bernaung di bawah bendera Perbanas. Satu hal yang masih belum terselesaikan oleh Bidang Hukum adalah penyelesaian surat dari Kementerian Keuangan terkait dengan obligasi dan dividen penyertaan saham eks empat bank yang dilikuidasi. Menurut Danny, keterlambatan ini terjadi karena masih menunggu keputusan terbentuknya pengurus Yayasan Perbanas yang baru.

Pada 2017 Bidang Luar Negeri bekerja sama dengan ABA menyelenggarakan beberapa seminar dan *workshop* di Jakarta dan ASEAN. Selain menyelenggarakan beragam acara, tak sedikit juga pengurus yang menghadiri acara, diskusi, atau menjadi pembicara atas nama Perbanas. Tidak ketinggalan, Bidang Hubungan Masyarakat, yang pada 2017 telah melakukan pembenahan *website* organisasi di www.perbanas.org. ■

RUA Perbanas 2018 dan Bankers' Discussion Forum

Pada 28 Juni 2018, Perbanas menyelenggarakan Rapat Umum Anggota (RUA) Perbanas 2018. Agenda tahunan yang diselenggarakan di Hotel Shangri-La, Jakarta, ini berisi pertanggungjawaban laporan keuangan dan kegiatan Perbanas selama 2017. RUA dipimpin oleh Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Umum Perbanas, dan dihadiri oleh Badan Pengawas, Badan Pengurus Perbanas Pusat dan Pengurus Perbanas Daerah serta Direksi dan Komisaris Wakil bank anggota Perbanas.

Gelaran RUA Perbanas 2018 diawali dengan penyelenggaraan Bankers' Discussion Forum. Hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut adalah Halim Alamsyah, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang membawakan tema "Peran LPS dalam Menjaga Stabilitas dan Menangani Krisis Keuangan". Pembicara lainnya adalah Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang menyampaikan tema "Dampak Kebijakan Fiskal dalam Mendukung Pertumbuhan Kredit Sektor Perbankan". ■



Upaya Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan

Perbanas Jabar mengembangkan Program Desa Asuh di Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Tujuh kolam untuk budi daya lele dan pelatihan diberikan untuk mengembangkan perekonomian desa tersebut. Lebih jauh, program ini juga untuk memenuhi kebutuhan lele di Provinsi Jabar.

Konsumsi lele di Provinsi Jawa Barat (Jabar) dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Namun, sayang, meningkatnya kebutuhan ini belum dibarengi dengan kemampuan produksi komoditas tersebut.

Saat ini sebagian besar kebutuhan lele di Jabar masih dipenuhi dari Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Melihat fenomena ini, Perbanas Jabar berinisiatif membuat Program Desa Asuh. Program yang diresmikan pada 4 Agustus 2018 ini memberikan bantuan tujuh kolam budi daya lele untuk warga Kampung Cikahuripan, Desa Nagrog, Kecamatan

Cicalengka, Kabupaten Bandung. Selain kolam lele, Perbanas Jabar memberikan bantuan bimbingan pemeliharaan lele dan manajemen usahanya.

Lokasi Desa Nagrog yang masih berada di Kabupaten Bandung menjadi pertimbangan Perbanas Jabar memilih desa ini sebagai objek Program Desa Asuh. “Dipilih Desa Nagrog karena lokasinya yang dekat dengan perkotaan. Dengan demikian, program ini bisa terpantau dengan baik,” ujar Rudy Kurniawan, Ketua Perbanas Jabar, saat meresmikan Program Desa Asuh ini. Rudy menegaskan bahwa program tersebut tidak hanya memberikan bantuan dari aspek ekonomi, tetapi juga membangun sumber daya manusia (SDM) supaya lebih mandiri dan membuka peluang kerja baru bagi warga setempat.

Program yang digagas Perbanas Jabar ini mendapat respons yang baik dari Pemerintah Daerah (Pemda) Jabar. Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Jabar, berharap masyarakat serius dan fokus dalam mengembangkan program tersebut. Kelanjutan dan keberhasilan program ini sepenuhnya tergantung pada masyarakat dan perangkat desa sehingga dibutuhkan kerja keras dan kebersamaan keduanya. Lebih jauh Iwa menjelaskan bahwa desa adalah basis untuk mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antara kota dan desa. Bila program ini berhasil niscaya dapat mengurangi urbanisasi.

Kecamatan Cicalengka memiliki 12 desa dengan jumlah penduduk 129.300 jiwa. Entang Kurnia, Camat Cicalengka, berharap Program Desa Asuh ini dapat menyentuh seluruh warga Kecamatan Cicalengka yang kurang mampu. Ke depan, program ini dapat merambat ke desa-desa lainnya. Diakui Entang, banyak warga Cicalengka yang tergolong kurang mampu dan seharusnya mendapatkan bantuan pangan tunai. Namun, sampai dengan sekarang mereka belum mendapatkannya. Program ini diharapkan dapat memberdayakan masyarakat.

Bersamaan dengan peresmian Program Desa Asuh, diselenggarakan literasi perbankan oleh Bank Jabar Banten. Dalam program tersebut dilakukan sosialisasi fasilitas pembiayaan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dan pemberian hadiah tabungan untuk pemenang lomba tilawatil Quran. ■



Program Desa Asuh Perbanas Jabar

Pada 4 Agustus 2018 Perbanas Jawa Barat (Jabar) meresmikan Program Desa Asuh di Kampung Cikahuripan, Desa Nagrog, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Program ini digagas Perbanas Jabar dengan tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan serta menciptakan lapangan kerja bagi warga Desa Nagrog.

Dalam program ini, Perbanas Jabar memberikan bantuan tujuh kolam untuk pemeliharaan lele. Melengkapi bantuan tersebut, Perbanas Jabar juga memberikan bimbingan budi daya lele dan manajemen usahanya. Hadir dalam peresmian Program Desa Asuh ini Rudy Kurniawan, Ketua Perbanas Jabar; Iwa Karniwa, Sekretaris Daerah Jabar; Sarwono, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bandung; Ismet Inono, mewakili Kantor Bank Indonesia (BI) Bandung; Entang Kurnia, Camat Cicalengka; Rektor Universitas Widyatama Bandung; serta pengurus dan profesional bank-bank yang menjadi anggota Perbanas Jabar. ■



Perbanas Sumut Tanam 2.000 Mangrove

Keprihatinan atas kondisi hutan *mangrove* di kawasan Belawan mendorong Perbanas Sumut untuk terlibat dalam kegiatan penanaman 2.000 *mangrove*. Ini merupakan salah satu upaya Perbanas Sumut untuk berkontribusi bagi lingkungan, dan diharapkan diikuti komunitas lainnya.

Menyadari pentingnya upaya pelestarian lingkungan, bekerja sama dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI), Perbanas Sumatera Utara (Sumut) pada 8 Juli 2018 melakukan kegiatan penanaman 2.000 *mangrove* di sekitar kawasan Belawan, tepatnya di Paluh Bajang, Paya Pasir, Marelan, Medan. Kegiatan ini dihadiri Akhyar Nasution, Wakil Wali Kota Medan; Bathara Surya Yusuf, Ketua YBHI; Arman Chandra, Direktur Program dan Kerja Sama YBHI; Camat Medan Marelan; Lurah Paya Pasir; serta tokoh pemuda dan masyarakat Medan. Sosialisasi kegiatan ini dilakukan melalui *talkshow* di *Radio Republik Indonesia (RRI)* Medan pada 5 Juli 2018 dan di *Lite FM* pada 6 Juli 2018 oleh Bathara dan Thomas C. Kusuma, Ketua Perbanas Sumut.

Kegiatan ini memang jauh dari bidang yang sehari-hari digeluti para profesional yang tergabung dalam Perbanas. Namun, menurut Thomas, karena kondisi hutan *mangrove* di kawasan Belawan sudah sangat mengkhawatirkan, Perbanas Sumut merasa prihatin dan perlu melibatkan diri dalam kegiatan pelestarian lingkungan tersebut.

Dilihat dari lokasinya yang dekat dengan Museum Kota Cina, selain untuk melestarikan lingkungan, hutan *mangrove* memberi manfaat ekonomi. Keberadaan hutan *mangrove* dapat menahan abrasi yang sangat membahayakan situs Museum Kota Cina. “Tanaman *mangrove* ini cukup penting keberadaannya karena menjadi garda terdepan penyeimbang lingkungan di kawasan pantai,” ujar Thomas.

Pohon *mangrove* yang dikelola dengan baik dan tumbuh menjadi hutan *mangrove* pun bisa menjadi tempat persinggahan burung-burung yang sedang bermigrasi. Sehingga, nantinya area ini bisa menjadi tempat wisata yang menarik.

Tak hanya itu, bagian pohon *mangrove* dapat diolah menjadi bahan yang bernilai ekonomi. Ranting *mangrove* bisa menjadi bahan pembuatan arang, sementara buahnya bisa diolah menjadi kripik, sirup, atau dawet. Alhasil, jika dikelola dengan baik, keberadaan hutan *mangrove* dan Museum Kota Cina bisa meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Keterlibatan Perbanas Sumut dalam kegiatan yang merupakan salah satu agenda *community social responsibility (CSR)* ini tak hanya berhenti pada kegiatan menanam

mangrove. Perbanas Sumut juga terlibat dalam kegiatan perawatannya selama tiga bulan ke depan. Jenis *mangrove* yang ditanam dalam kegiatan ini adalah *rizophora munocrata* dan turunannya, seperti berembang, prepat, api-api, dan mata buaya. Tinggi *mangrove* jenis *rizophora munocrata* bisa mencapai 20 meter.

Menurut Bathara, supaya pohon *mangrove* dapat bertahan hidup dan tidak mati saat air pasang, teknik yang digunakan adalah teknik polong bambu. Kegiatan ini melibatkan relawan-relawan yang sudah bersertifikat. “Dengan teknik ini, kemungkinan hidup pohon *mangrove* lebih besar, bisa mencapai 95%,” tambah Bathara. ■



Perbanas Sumut Peduli Lingkungan

Pada 8 Juli 2018 bekerja sama dengan Yayasan Budaya Hijau Indonesia (YBHI), Perbanas Sumatera Utara (Sumut) menyelenggarakan kegiatan penanaman 2.000 *mangrove* di sekitar kawasan Belawan, tepatnya di Paluh Bajang, Paya Pasir, Marelان, Medan, Sumut. Kegiatan ini menjadi bukti kepedulian Perbanas Sumut terhadap kelestarian lingkungan kawasan Belawan. Keterlibatan Perbanas Sumut dalam kegiatan ini masih berlanjut tiga bulan ke depan dalam bentuk pemeliharaan habitat *mangrove* ini.

Penanaman 2.000 *mangrove* ini dihadiri Akhyar Nasution, Wakil Wali Kota Medan; Bathara Surya Yusuf, Ketua YBHI; Arman Chandra, Direktur Program dan Kerja Sama YBHI; Camat Medan Marelان; Lurah Paya Pasir; serta tokoh pemuda dan masyarakat Medan. Selain bermanfaat menjaga lingkungan dari abrasi, beberapa bagian pohon *mangrove* bisa memberikan manfaat ekonomi karena bisa diolah menjadi bahan makanan, seperti keripik, sirup, dan dawet. ■



Mortgage Forum Kerja Sama Perbanas dan Infobank

Bekerja sama dengan *Infobank*, pada 12 Juli 2018 Perbanas menyelenggarakan Mortgage Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta. Forum yang mengangkat tema “Prospek Bisnis Mortgage Setelah Relaksasi LTV: Bagaimana Developer dan Bank Mengambil Peluang?” ini mendapat respons yang baik dari pelaku bisnis perbankan dan properti. *Keynote speech* acara ini disampaikan oleh Lana Winayanti, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Forum dibagi menjadi dua sesi diskusi. Sesi pertama menghadirkan Filianingsih Hendarta, Asisten Gubernur Bank Indonesia (BI) dan Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI; Budi Satria, Direktur Consumer Banking Bank Tabungan Negara (BTN); Handayani, Direktur Consumer Banking Bank Rakyat Indonesia (BRI); Soelaeman Soemawinata, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI); dan Raden Pardede, pengamat ekonomi, sebagai pembicara. Pembicara pada sesi kedua adalah Mochtar Riady, *Founder* Lippo Group; Ananta Wiyogo, Direktur Utama Sarana Multigriya Finansial (SMF); Igenesjz Kemalawarta, Direktur Sinarmas Land; dan Suryanti Agustinar, Ketua Indonesia Mortgage Bankers Association (IMBA). ■





PERBANAS INSTITUTE



Follow Our Official Account in Social Media Apps For News Update:

Perbanas Institute

@perbanas

perbanas.institute

infopmb@perbanas.id
contact@perbanas.id

www.perbanas.id

SEKOLAH PASCASARJANA

Learning From Science and Experiences

MAGISTER AKUNTANSI

- Akuntansi Perpajakan
- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Pengauditan
- Akuntansi Manajemen
- Akuntansi Sektor Publik
- Akuntansi Syariah

PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM
Reguler, Fastrack, In-house Training

Kampus Jakarta
Jl.Perbanas, Karet Kuningan, Setiabudi
Telp (021) 5252533, 5222501-4
Faks (021) 5228460, 5222645

Kampus Bekasi
Jl. Cut Meutia Raya No:2
Telp (021) 8224432, 8224383
Faks (021) 8224432

MAGISTER MANAJEMEN

- Manajemen Perbankan
- Manajemen Perbankan Syariah
- Manajemen Keuangan
- Manajemen Pemasaran
- Manajemen Strategik
- Manajemen Sumber Daya Manusia

PERIODE PERKULIAHAN :
MARET, JULI, OKTOBER

WAKTU PERKULIAHAN

Kelas	Hari	JAM
Pagi	Selasa & Kamis	08.00 - 12.00
Malam	Senin - Kamis	18.30 - 21.00
Akhir Pekan	Sabtu	08.00 - 17.00